

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan bisnis antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Hubungan agensi didefinisikan ketika agen dipekerjakan oleh satu atau lebih pemilik perusahaan, yaitu *principal*. Pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana kepada pihak internal perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan untuk mengelola perusahaan agar dapat bertahan di dunia bisnis. Sedangkan, agen mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa sesuai dengan kepentingan *principal*. Hubungan tersebut melibatkan adanya delegasi wewenang pengambilan keputusan dari *principal* dan *agent*, karena *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan yang berbeda (Rahmawati, 2012:97).

Konflik keagenan terjadi saat pemegang saham tidak mampu memastikan apakah tindakan manajer sesuai dengan kepentingan mereka. Pemegang Saham dapat menilai kinerja perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan yang diberikan manajemen perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya (Rahmawati, 2012:151). Teori keagenan menjelaskan dapat menimbulkan asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, karena agen bertindak sebagai pihak yang terjun langsung dalam operasional perusahaan jadi agen lebih banyak memiliki informasi mengenai kapasitas diri perusahaan, lingkungan kerja dan prospek perusahaan secara keseluruhan di masa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* selaku pemilik perusahaan yang memiliki sedikit informasi tentang kondisi perusahaan. Kondisi seperti inilah yang dapat memunculkan asimetri informasi dan masalah keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham dengan manajer.

Secara keseluruhan, dengan adanya masalah keagenan dapat memunculkan biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi *agency problem*. Biaya keagenan ditemukan ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, atasan dengan bawahan, antar manajer dari departemen, atau kantor cabang yang saling bersaing (John A. Pearce dan Richard B. Robinson, 2008:48). Biaya agensi terdiri dari (1) biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan *agent* dalam mengelola perusahaan (2) biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan dan (3) serta *opportunity cost* yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Lukas Setia Atmaja, 2008:13)

Dengan demikian untuk mengurangi biaya agensi tersebut, manajer dapat melakukan Pengungkapan Sukarela. Melalui Pengungkapan Sukarela ini *principal* dapat lebih memahami kondisi perusahaan serta nyata seperti kebijakan strategi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

2.1.2. Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori Sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal (Sri Dwi Ari Ambarwati, 2010:50-51). Teori Sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik dan pihak yang berkepentingan lainnya (investor) (Sri Dwi Ari Ambarwati, 2010:84). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang berisikan tentang pengungkapan informasi wajib dan pengungkapan informasi sukarela. Karena informasi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat penting bagi pihak eksternal perusahaan karena dapat mempengaruhi keputusan investasi di masa kini dan di masa yang akan datang.

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis lainnya, karena pada hakekatnya informasi menyajikan keterangan, catatan atau gambaran perusahaan baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun proyeksi keadaan di masa yang akan datang yang berguna bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di Pasar Modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Apabila pengumuman (pengungkapan) informasi perusahaan tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak eksternal perusahaan tertuang dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Oleh sebab itu, Pengungkapan Sukarela yang diberikan oleh perusahaan diharapkan mampu menimbulkan sinyal di Pasar Modal agar mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.3. Luas Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan (*Disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi kondisi keuangan dan penjelasan yang cukup mengenai aktivitas operasional yang dijalankan dan hasil dari aktivitas operasional yang dijalankan oleh perusahaan (Chariri dan Ghozali, 2003:235). Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan mampu menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil dari aktivitas operasional perusahaan. Pada umumnya ada tiga konsep Pengungkapan (*Disclosure*), yaitu (Suwardjono, 2005:578):

1. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

Tingkat pengungkapan yang cukup adalah pengungkapan yang harus dipenuhi secara keseluruhan agar tidak menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak.

3. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Pengungkapan penuh berkaitan dengan kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara berlimpah atau berlebihan. Sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik.

Luas Pengungkapan (*Disclosure*) adalah luasnya pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Selain itu, diatur Pemerintah melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-431/BL/2012 yang diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2012, tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik juga mengatur mengenai pengungkapan informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah atau lembaga profesional (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah *go public*. Tujuan pemerintah mengatur pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor, karena adanya kepentingan pribadi manajemen.

Pengungkapan Sukarela merupakan jenis-jenis informasi yang tidak diwajibkan oleh Pemerintah untuk diungkapkan, sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan pengungkapan sukarela atau tidak. Motif manajemen perusahaan yang

melakukan pengungkapan sukarela adalah manajemen ingin mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan agar pihak pengguna laporan tahunan memberi sinyal yang baik dalam menilai perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi secara sukarela.

Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) menggambarkan luasnya pengungkapan informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pemberian skor untuk setiap item pengungkapan dilakukan secara dikotomis, dimana item yang diungkapkan diberi nilai satu (1), sementara jika item tersebut tidak diungkapkan diberi nilai nol (0).
2. Skor yang diperoleh tiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
3. Pengukuran Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) tiap perusahaan dilakukan dengan cara membagi skor total tiap perusahaan dengan skor total yang diharapkan. Semakin banyak item yang diungkapkan, maka semakin besar pula Indeks Pengungkapan Sukarela.

Pengukuran luas pengungkapan sukarela dalam penelitian ini menggunakan daftar pengungkapan sukarela tanpa pembobotan. Metode ini dipilih dengan alasan sebagai berikut:

1. Laporan tahunan yang dikeluarkan perusahaan ditujukan bagi para pengguna informasi perusahaan sehingga dimungkinkan dapat terjadi perbedaan persepsi para pengguna.
2. Untuk menghindari pemberian bobot secara subjektif terhadap *item-item* informasi yang diungkapkan. Indeks pengungkapan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pengungkapan Sukarela} = \frac{\text{Jumlah skor } \textit{item} \text{ pengungkapan yang dipenuhi}}{\text{Total } \textit{item} \text{ pengungkapan}}$$

(Anita Yolanda Suta, 2012:56)

2.1.4. Ukuran (*Size*) Perusahaan

Ukuran Perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang dilihat dari total aset, nilai penjualan, atau nilai kapitalisasi pasar. Semakin besar aktiva suatu perusahaan berarti semakin besar modal yang diinvestasikan. Semakin besar total penjualan yang dicapai suatu perusahaan maka semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar. Nilai kapitalisasi yang tinggi mencerminkan perusahaan di kenal oleh masyarakat (Asnawi dan Wijaya, 2005:274).

Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi atas tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Suad Husnan, 2007:45). Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas di lingkungan masyarakat, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap lingkungan masyarakat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi Pemerintah, ukuran perusahaan akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima. Ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi pengungkapan sukarela. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari para *stakeholders* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan (Nuryaman, 2009:93-94).

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuannya dalam memperoleh dana (pinjaman) yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang besar biasanya lebih dikenal oleh masyarakat daripada ukuran perusahaan yang kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan logaritma natura dari besarnya total aktiva perusahaan. Untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)}$$

(Arthur J. Keown, 2009:231)

2.1.5. Umur Perusahaan

Umur (*AGE*) perusahaan mencerminkan lamanya waktu suatu perusahaan eksis dan bertahan dalam dunia bisnis. Umur perusahaan sering kali digunakan dalam menentukan tingkat risiko perusahaan. Perusahaan yang sudah *mature* dianggap *less risky*. Umur perusahaan juga menunjukkan sejarah dan *track record* perusahaan yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator sehubungan dengan luas pengungkapan sukarela.

Perusahaan yang lebih lama beroperasi kemungkinan akan menyediakan publisitas informasi yang lebih lengkap dan lebih banyak dengan begitu kebutuhan masyarakat untuk mencari informasi perusahaan akan lebih mudah dibanding dengan perusahaan yang baru berdiri. Umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan kualitas pengungkapan informasi sukarela (Marwata, 2001:18). Hal tersebut didasari oleh pengalaman perusahaan, karena perusahaan yang berumur lebih lama memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaan di dalam Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia). Umur perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan rumus:

$$AGE = \text{Tahun Pengamatan} - \text{Tahun berdiri perusahaan}$$

(Akin Septian Permono, 2011:47)

2.1.6. Leverage

Leverage (LEV) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuiditas (Thomas Sumarsan, 2013:46). Rasio ini menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari risiko pada kreditur berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya dari pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi

pembayaran dividen. Semakin tinggi rasio ini semakin banyak uang kreditur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio hutang perusahaan maka semakin besar pengaruh keuangan perusahaan (Thomas Sumarsan, 2013:47). Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Tujuan dan manfaat rasio *Leverage* adalah:

1. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang;
5. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai dan mengetahui atau mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri (Kasmir, 2012:165-166).

Total hutang merupakan hutang perusahaan baik hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan. *Leverage* dalam penelitian ini diprosikan dengan *Debt Ratio* (DR):

$$DR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(Lukas Setia Atmaja, 2008:415)

2.1.7. Kepemilikan Publik

Pengertian Publik adalah pihak lain atau individu yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa terhadap perusahaan atau sering disebut masyarakat (*public*). Kepemilikan Publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat (*public*) di dalam suatu perusahaan. Publik hanya menanamkan modal atau sahamnya saja akan tetapi tidak ikut terjun langsung dalam pengelolaan perusahaan. Publik hanya menginginkan saham yang ditanamkan akan menghasilkan dividen atau imbalan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Kepemilikan Publik dalam penelitian ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki publik}}{\text{Jumlah saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

(Anita Yolanda Suta, 2012:58)

2.1.8. Net Profit Margin

Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. *Net Profit Margin* adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar nilai NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu risiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut

investor dapat menilai apakah perusahaan itu *profitable* atau tidak. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Net Profit Margin dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dengan penjualan sehingga didapat laba per setiap rupiah penjualan (Darsono dan Ashari, 2005:56). Sehingga ketika *net profit margin* rendah manajemen akan membuat perencanaan strategi di masa yang akan datang dalam mencapai tujuan *net profit margin* dan hal tersebut akan diungkapkan dalam laporan tahunan. *Net Profit Margin* dalam penelitian ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

(Darsono dan Ashari, 2005:56)

2.1.9. *Return On Equity*

Return On Equity (ROE) merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal saham sendiri. Sehingga ROE juga dapat digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (persentase) dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis. (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:123).

Return On Equity mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai profitabilitas modal sendiri. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh pemilik atau investor untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi keuntungan investor karena semakin efisien modal yang ditanamkannya. Dengan demikian, rasio ini sangat mendapat perhatian para investor. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen (Sutrisno, 2009:223). *Return On Equity* (ROE) dalam penelitian ini dihitung dengan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \times 100\%$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:115)

2.1.10. Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban *financial* jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek tepat pada waktunya (Benny Alexandri dan Linna Ismawati, 2005:16). Berdasarkan pengertian likuiditas tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan pengukuran kemampuan perusahaan yang harus mampu dibayar atau memenuhi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo.

Dalam sebuah perusahaan pengendalian likuiditas sangat penting, karena bertujuan menguji kecukupan dana perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi. Selain itu likuiditas sangat diminati oleh kreditor, karena kreditor sangat tertarik menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang yang segera harus dilunasi. Semakin cepat suatu perusahaan mampu membayar kewajibannya maka perusahaan tersebut akan tercukupi aktivasnya untuk membuat produk baru yang akan membuat inovasi-inovasi yang baru yang nantinya akan membuat jumlah permintaan juga semakin tinggi.

Jenis-jenis rasio likuiditas, yaitu:

a. *Current Ratio*

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.

b. *Cash Ratio* atau *Ratio of Immediate Solvency*

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih *liquid* (*liquid assets*).

c. *Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid (*liquid assets*).

d. *Working Capital to Total Assets Ratio*

Working Capital to Total Assets Ratio dipergunakan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja (*netto*) (Benny Alexandri dan Linna Ismawati, 2005:16).

Dalam penelitian ini rasio likuiditas di proksikan dengan *Current Ratio*. Kondisi perusahaan yang memiliki *Current Ratio* yang baik dianggap sebagai perusahaan yang memiliki kinerja manajemen perusahaan yang baik dan bagus, namun jika *Current Ratio* terlalu tinggi juga dianggap tidak baik karena mengindikasikan adanya masalah seperti jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya *over investment* dalam persediaan tersebut atau adanya saldo besar piutang tak tertagih. Dalam penelitian ini alasan rasio likuiditas diproksikan dengan *current ratio*, karena memiliki kemampuan yang dapat mengukur:

1. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dimana semakin tinggi perkalian kewajiban lancar terhadap aktiva lancar, semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar akan dibayar.
2. Penyangga kerugian, semakin besar penyangga semakin kecil risikonya. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aktiva lancar non-kas pada saat aktiva tersebut dilikuiditas.
3. Cadangan dana lancar, rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan seperti adanya pemogokan dan kerugian luar biasa dapat membahayakan arus kas secara tidak terduga. *Current Ratio* (Rasio Lancar) dalam penelitian ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio (Rasio Lancar)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:95)

2.1.11. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas dan tidak dalam posisi kepentingan. Namun, dalam kaitannya dengan konsep komisaris dan direktur independen, perlu dicermati terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan independen. Dalam penelitian Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) mengungkapkan ada dua pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut.

Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimiliki untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009:110).

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, tidak terafiliasi dengan komisaris lainnya, tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan lainnya serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Ada beberapa misi yang diemban komisaris

independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab, yaitu:

- a. Mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial.
- b. Mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan.
- c. Bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara selektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. (Anggi S. Wachyuni, 2010)

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sedangkan komisaris independen sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Muh. Arief Effendi, 2009:9). Lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu besarnya kekuasaan yang eksekutif telah menjadi sebagian dari penyebab tumbangya perusahaan-perusahaan dunia. Dan lemahnya pengawasan terhadap manajemen juga diindikasikan sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris dengan cara memperkenalkan komisaris independen yang diharapkan akan menjadi penggerak *Good Corporate Indonesia* telah menjadi bagian dari reformasi kehidupan bisnis di Indonesia pascakrisis. Dalam kaitannya dengan implementasi *Good Corporate Indonesia* di perusahaan diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, peranan komisaris independen sangatlah penting. Selain itu, terdapat kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris yaitu masih lemahnya kompetensi dan integritas antara komisaris komisaris dan direksi. Hal ini dapat terjadi karena pengangkatan komisaris biasanya hanya didasarkan pada penghargaan, hubungan keluarga atau hubungan dekat lainnya (Muh. Arief Effendi, 2009:19). Proporsi Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

(Noor Laila Fitriana dan Andri Prastiwi, 2014:5)

2.1.12. Komite Audit

Komite audit adalah orang-orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) dan komite yang bertugas untuk mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan peraturan BAPEPAM Kep-643/BL/2012 tentang peraturan nomor IX.1.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review sistem Pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan juga ketaatan terhadap peraturan (www.Komiteaudit.org).

Tujuan pembentukan komite audit adalah;

- a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
- b. Memastikan bahwa pengontrolan internal perusahaan memadai.
- c. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material bidang keuangan dan implikasi umumnya.
- d. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal (Susisana dan Arleen Herawaty, 2007:8-9).

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite audit tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya Komite Audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya sebagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan baik yang terjadi di Amerika Serikat maupun di Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009:111)

Dengan demikian, dapat dikatakan komite audit merupakan alat pengawasan internal yang memiliki fungsi membantu dewan komisaris dengan menjalankan prinsip tanggung jawab, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Dengan terbentuknya komite audit, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi yang ada antara *principal* dan *agent*. Komite Audit dalam penelitian ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah anggota dalam Komite Audit}$$

(Henggar Malika Purna Cahya, 2013:398)

2.2. Review Penelitian Terdahulu (Theoretical Mapping)

Penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya dengan hasil yang beragam, masih terdapat perbedaan hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, diantaranya:

Alsaeed (2006) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Karakteristik Spesifik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar di Saudi *Stock Market* (SSM) Tahun 2003”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap Pengungkapan Informasi Sukarela dalam Laporan Tahunan. Sedangkan, *Leverage*, Umur Perusahaan, *Ownership Dispersion*, *Profit Margin*, ROE, Likuiditas, Tipe Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan.

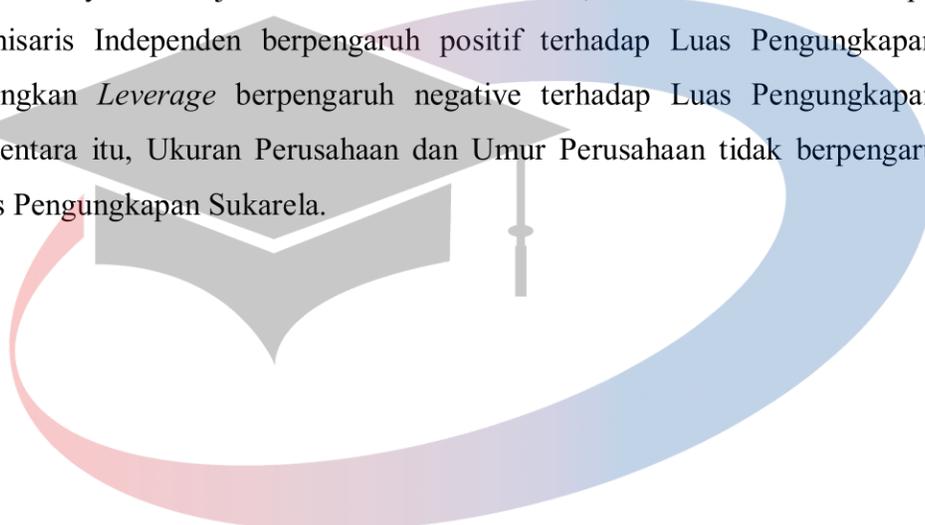
Anita Yolanda Suta (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela. Akan tetapi, Umur Perusahaan, *Ownership Dispersion*, *Return On Equity* dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela. Selain itu, hasil *content analysis* menunjukkan bahwa rata-rata tingkat Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur masih relatif rendah.

Haryanto dan Ira Yunita (2006) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estat yang Listing di Bursa Efek Jakarta tahun 2003-2004)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sukarela. Sedangkan, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela.

Lovancy Trisanti (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan Rasio Likuiditas, Rasio *Leverage*, Rasio Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Status Perusahaan, Umur Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik berpengaruh secara signifikan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Manufaktur. Secara parsial, Rasio Profitabilitas, Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik dan Ukuran

Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur.

Noor Laila Fitriana (2014) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam *Annual Report* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Profitabilitas, Ukuran KAP dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Sukarela, sedangkan *Leverage* berpengaruh negative terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. Sementara itu, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL

Tabel 2.1.
Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Alsaeed (2006)	Hubungan antara Karakteristik Spesifik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan pada tahun 2003 yang terdaftar di Saudi <i>Stock Market</i> (SSM)	<p><u>Variabel Independen:</u> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, <i>Ownership Dispersion</i>, Umur Perusahaan, <i>Profit Margin</i>, ROE, Likuiditas, Tipe Industri dan Ukuran Perusahaan Audit</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan Sukarela</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, <i>Ownership Dispersion</i>, Umur Perusahaan, <i>Profit Margin</i>, ROE, Likuiditas, Tipe Industri dan Ukuran Perusahaan Audit berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan</p> <p><u>Secara Parsial:</u> variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Sukarela dalam Laporan Tahunan. Sedangkan, <i>Leverage</i>, Umur Perusahaan, <i>Ownership Dispersion</i>, <i>Profit Margin</i>, ROE, Likuiditas, Tipe Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan.</p>
Anita Yolanda Suta (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Laporan Tahunan	<p><u>Variabel Dependen:</u> Luas Pengungkapan Informasi Sukarela</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Likuiditas, Umur Perusahaan, <i>Ownership Dispersion</i>, <i>Return</i></p>

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010)		<p><u>Variabel Independen:</u> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Likuiditas, Umur Perusahaan, <i>Ownership Dispersion</i>, <i>Return On Equity</i> dan Proporsi Dewan Komisaris Independen</p>	<p><i>On Equity</i> dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela</p> <p><u>Secara Parsial:</u> variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela. sedangkan, Umur Perusahaan, <i>Ownership Dispersion</i>, <i>Return On Equity</i> dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela.</p>
Haryanto dan Ira Yunita (2006)	<p>Analisis Likuiditas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estat yang Listing di Bursa Efek Jakarta tahun 2003-2004)</p>	<p><u>Variabel Independen:</u> Likuiditas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan Sukarela</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> variabel Likuiditas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela</p> <p><u>Secara Parsial:</u> variabel <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Sukarela. Sedangkan, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela</p>

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Leony Lovancy Tristanti (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010)	<p><u>Variabel Dependen:</u></p> Kelengkapan Pengungkapan Sukarela	<p><u>Secara Simultan:</u> variabel Rasio Likuiditas, Rasio <i>Leverage</i>, Rasio Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Status Perusahaan, Umur Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik berpengaruh secara signifikan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Manufaktur</p> <p><u>Secara Parsial:</u> variabel Rasio Profitabilitas, Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela sedangkan, Likuiditas, <i>Leverage</i>, Status Perusahaan dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur.</p>
Noor Laila Fitriana (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam <i>Annual Report</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun	<p><u>Variabel Dependen:</u></p> Luas Pengungkapan Sukarela	<p><u>Secara Simultan:</u> variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran KAP, Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela</p>

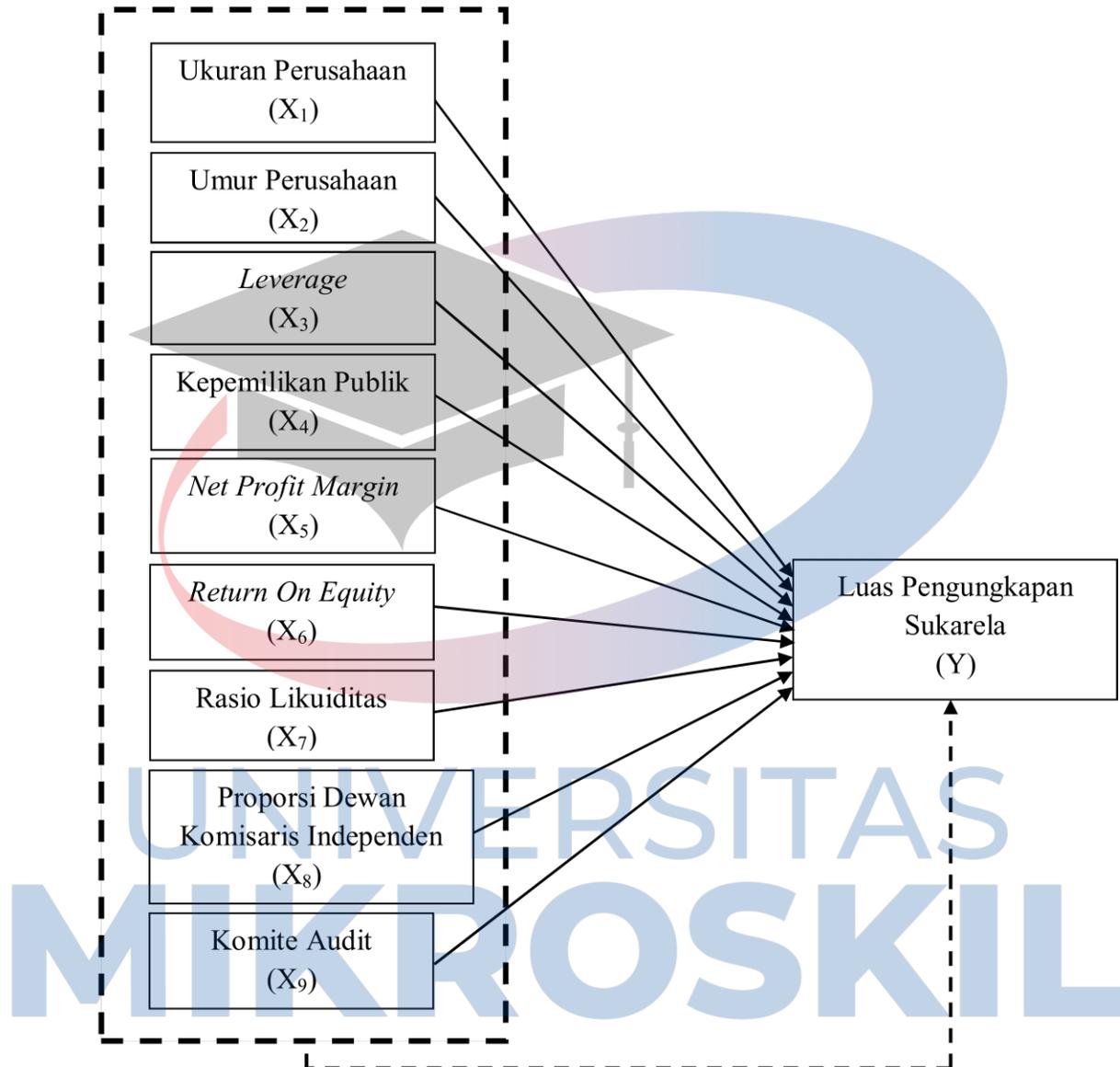
Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
2010-2012		KAP, Proporsi Dewan Komisaris Independen	Secara Parsial: variabel Profitabilitas, Ukuran KAP dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Sukarela, sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. Sementara itu, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu gambaran ringkas mengenai hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti, atau menggambarkan pengaruh atau hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Dalam penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dimana variabel independennya adalah Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Publik, *Net Profit Margin*, *Return On Equity*, Rasio Likuiditas, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Sedangkan variabel dependennya adalah Luas Pengungkapan Sukarela. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka konsep penelitian ini adalah:

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

Ket :

— = Parsial

----- = Simultan

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah diungkapkan, beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela pada penelitian ini, antara lain:

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari jumlah aktiva, modal, pendapatan dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan dan kapasitas pasar. Semakin tinggi total keuntungan dari hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dan kapasitas pasar perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Hal ini berhubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela. Karena dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, perusahaan mempunyai biaya yang cukup untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dan informasi yang disajikan dapat lebih transparan yang akhirnya dapat meminimalkan terjadinya kesenjangan informasi sebagai salah satu penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Tata Kelola Perusahaan (*good corporate governance*) yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi (Bambang Purnomosidhi, 2006:7). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.2. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Umur Perusahaan merupakan awal perusahaan berdiri dan melakukan aktivitas operasional perusahaan hingga dapat mempertahankan (*going concern*) perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam persaingan dunia bisnis. Semakin lama umur perusahaan semakin terlihat pula eksistensi perusahaan (*going concern*) dan semakin terlihat kemampuan perusahaan bertahan dalam persaingan dunia bisnis, sehingga semakin luas pengungkapan informasi yang dilakukan manajemen perusahaan yang berkaitan untuk menciptakan keyakinan pada pihak luar dalam kualitas

perusahaannya (Ahmadi Nugroho, 2012:4). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.3. Pengaruh *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Dalam teori keagenan mengemukakan bahwa terdapat suatu potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholders* kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan-perusahaan yang tingkat ketergantungannya kepada utang sangat tinggi sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang tinggi. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, manajemen perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela. Dengan demikian, semakin tinggi *Leverage* perusahaan menunjukkan semakin tingginya risiko pada kreditur berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada kreditur. Sehingga manajemen perusahaan cenderung akan menyajikan informasi kinerja perusahaan yang lebih transparan di laporan tahunan guna memberikan keyakinan kepada kreditur akan kemampuan perusahaan dalam membayar utang serta bunga pinjamannya yang biasa ditunjukkan dengan meningkatnya laba perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.4. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh masyarakat (*Public*) merupakan sejumlah saham yang beredar yang dimiliki oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh publik, dapat dijadikan alat pengawasan dari luar eksternal untuk menilai kinerja manajemen suatu perusahaan melalui Laporan Keuangan Tahunan, yang diharapkan dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela yang dapat mengurangi konflik agensi yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.5. Pengaruh *Net Profit Margin* terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Net Profit Margin dijelaskan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih (Darsono dan Ashari, 2005:56), atau dengan kata lain melihat besarnya laba yang mampu dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi dan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Investor sangat menyukai perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang tinggi, pada dasarnya investor menanamkan modalnya di perusahaan seperti itu. Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada pihak eksternal perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅: *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.6. Pengaruh *Return On Equity* terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Return On Equity (ROE) merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal sendiri. Sehingga ROE juga dapat digunakan untuk menilai besar persentase tingkat pengembalian dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis. Semakin tinggi maupun rendah ROE yang dihasilkan oleh perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investasi atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba akan dapat menarik perhatian para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya. Dapat disimpulkan, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pengungkapan informasi yang lebih luas yang dianggap relevan dan mendukung untuk pengambilan keputusan investasi.

H₆: *Return On Equity* berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.7. Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Rasio Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio*. *Current Ratio* adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio* merupakan salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami kesulitan. Semakin besar *Current Ratio* menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan agar pihak eksternal mendapat sinyal yang baik mengenai kinerja perusahaan.

H₇: Rasio Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.8. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

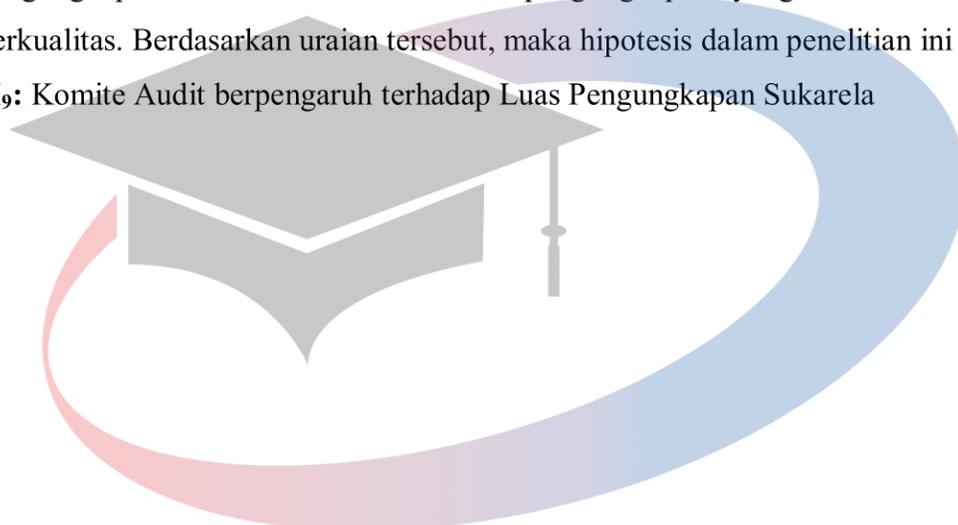
Komisaris Independen adalah komisaris yang dipilih tanpa mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak internal perusahaan seperti manajemen perusahaan maupun pemilik perusahaan dan tidak mempunyai jabatan di perusahaan lain. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen terhadap total anggota komisaris yang ada di perusahaan, maka aktivitas pengawasan pelaksanaan prinsip tata kelola yang berupa transparansi informasi akan berjalan lebih efektif, sehingga manajemen akan lebih terdorong untuk meningkatkan luas pengungkapan sukarela (Noor Laila Fitriana dan Andri Prastiwi, 2014:4). Dengan meningkatnya jumlah dewan komisaris independen, maka tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dapat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah komisaris independen yang sedikit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₈: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

2.4.9. Pengaruh Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Komite Audit berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencegah tindakan kecurangan seperti menyajikan informasi yang tidak akurat dan tidak relevan. Semakin besar ukuran Komite Audit suatu perusahaan maka dapat mempengaruhi pengungkapan informasi yang dilakukan baik pengungkapan informasi wajib maupun pengungkapan informasi sukarela dan pengungkapan yang dilakukan akan lebih berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₉: Komite Audit berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela



UNIVERSITAS
MIKROSKIL